

**PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) DALAM PENGEMBANGAN UMKM
DI KABUPATEN PRINGSEWU
(Studi di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)**

(Skripsi)

Oleh

PUTRI ALBASHITA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) DALAM PENGEMBANGAN UMKM
DI KABUPATEN PRINGSEWU
(Studi di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)**

Oleh

PUTRI ALBASHITA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN PRINGSEWU (Studi di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)

Oleh

PUTRI ALBASHITA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu (Studi di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Informan penelitian yaitu Kepala Bidang Perekonomian dan SDA dan pelaku usaha atau pemilik UMKM unit usaha perdagangan di Kecamatan Pringsewu. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: (1) Peranan BAPPEDA Kabupaten Pringsewu mengkoordinir para pihak atau stakeholder maupun instansi OPD struktural terkait (2) Merencanakan secara terintegrasi program pengembangan UMKM (3) Memonitoring evaluasi program pengembangan UMKM yang dijalankan OPD. Untuk memaksimalkan fasilitasnya keterbatasan dampak pengembangan UMKM, direkomendasikan agar peranan BAPPEDA diintensifkan untuk pengembangan UMKM yang merata.

Kata Kunci: UMKM, Pengembangan, Perdagangan.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY (BAPPEDA) IN MSME DEVELOPMENT IN PRINGSEWU REGENCY (Study in Pringsewu District, Pringsewu Regency)

By

PUTRI ALBASHITA

This study aims to determine the role of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in the development of MSMEs in Pringsewu Regency (Study in Pringsewu District, Pringsewu Regency). The method used is a qualitative research with a descriptive approach using primary and secondary data sources. Research informants are the Head of the Economic and Natural Resources Division and business actors or owners of MSME trading business units in Pringsewu District. Collecting data using observation, interviews and literature study. Data analysis consists of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate the following: (1) The role of BAPPEDA Pringsewu Regency in coordinating the parties or stakeholders as well as related structural OPD agencies (2) Planning in an integrated manner the MSME development program (3) Monitoring the evaluation of the MSME development program run by the OPD. To maximize the facilitation of the limited impact of MSME development, it is recommended that the role of BAPPEDA be intensified for the equitable development of MSMEs.

Keywords: MSME, Development, Trade.

Judul Skripsi : **PERANAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI
KABUPATEN PRINGSEWU
(Studi di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten
Pringsewu)**

Nama Mahasiswa : **Putri Albashita**

No. Pokok Mahasiswa : **1716011008**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Drs. Usman Raidar, M.Si.
NIP. 196011191988021001

2. **Ketua Jurusan**

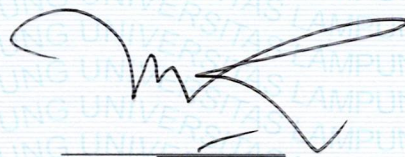
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bartoven Vivit Nurdin', is written over the text 'Ketua Jurusan'.

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos, M.Si.
NIP. 197704012005012003

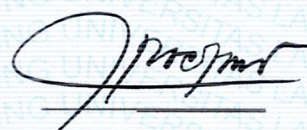
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Usman Raidar, M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Erna Rochana, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **13 Juni 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,



Putri Albashita
NPM 1716011008

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Putri Albashita lahir di Pringsewu pada tanggal 8 Mei 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hendra Chanta dan Ibu Rahmawati. Penulis memulai jenjang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) BAITUSSALAM Pringsewu diselesaikan pada tahun 2003-2005. Selanjutnya, pada tahun 2005 menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pringsewu Barat diselesaikan pada tahun 2011.

Pendidikan selanjutnya, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pringsewu pada tahun 2011 diselesaikan pada tahun 2014. Kemudian, penulis menempuh pendidikan selanjutnya, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pringsewu tahun 2014 diselesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 sampai sekarang penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1 di Universitas Lampung program studi Sosiologi melalui seleksi SNMPTN. Pada tahun 2020, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 di Desa Dwi Karya Musika, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

(Imam Syafi’i)

“Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.”
(Theodore Rosevelt)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas do'a serta dukungan dari orang-orang tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungannya untuk diriku sehingga dapat terselesaikannya karya sederhana ini (Skrispi). Tidak lupa sebagai rasa syukurku, kupersembahkan karya tulis ini kepada:

“PAPAHKU Hendra Chanta dan MAMAHKU Rahmawati”

Terimakasih untuk kedua orangtuaku yang telah menyanyangi, memperhatikan, memberikan dorongan baik moril maupun materil untuk mencapai kesuksesan. Terimakasih untuk segala pengorbanan papa dan mama selama ini untuk aku dan adik-adik, akan kulakukan semua hal yang dapat membuat papa dan mama bangga terhadapku.

Kanasya Febiandra dan M. Alif Malika

Terimakasih untuk adik-adikku tercinta dan tersayang yang telah membantuku dalam segala hal serta memberikan semangat dan dukungan yang sangat berarti untukku.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Terimakasih sudah menjadi tempat mencari, dan menggali ilmu serta pengalaman hidup untukku.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu” (Studi di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, sehingga dukungan, bimbingan, saran dan nasihat dari semua pihak sangat membantu bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. Usman Raidar, M.Si., selaku Dosen Pembimbing atas kesediaannya memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Dr. Erna Rochana, M.Si., selaku Dosen Penguji pada ujian skripsi. Terimakasih untuk masukan, dan saran-saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Drs. I Gede Sidemen, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Dosen, dan Staf administrasi Jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah memberi ilmu pengetahuan serta membantu administrasi kepada penulis selama perkuliahan.
10. Kedua orang tua, yaitu Papahku Hendra Chanta dan Mamahku Rahmawati, adik-adikku Kanasya Febiandra dan M. Alif Malika yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat dan selalu memberikan nasehat yang terbaik sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.
11. Teman-teman seperjuangan di bangku kuliah seluruh rekan S1 Sosiologi angkatan 2017.
12. Teman hidup 24/7 di kosan Asrama Anggun dari jaman awal perkuliahan hingga sekarang, yaitu Yolanda, Aulia, dan Alin. Terimakasih telah memberikan kenangan indah selama ini yang tidak akan pernah terlupakan, juga memberikan doa, dukungan, dan saling tolong menolong.
13. Keluarga KKN Desa Dwi Karya Mustika atau yang biasa disebut DKM Metal, Madrois, Iqbal, Wawa, Nabila, Anggi, dan della. Serta Bapak Kepala Desa yaitu Pak Edy beserta Ibu, Pak Sekdes yaitu Mas Winarso, aparat kampung, serta masyarakat Desa Dwi Karya Mustika. Terimakasih telah memberikan begitu banyak pengalaman dan pelajaran hidup selama 40 hari.
14. Untuk setiap Informan dalam penelitian penulis. Bapak Kepala Sub Bidang Perekonomian dan SDA dan para pelaku usaha dan pemilik UMKM unit usaha perdagangan di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Terimakasih telah meluangkan waktunya serta berkontribusi untuk penelitian ini, dan tanpa kalian penelitian ini tidak akan berjalan.
15. Untuk diri saya sendiri, terimakasih banyak sudah selalu kuat, semangat, dan selalu berusaha melalui proses perkuliahan ini. Semoga diri ini selalu diberikan rasa syukur, pantang menyerah, kesehatan, dan kebahagiaan.

16. Almamaterku tercinta Universitas Lampung, terimakasih telah menjadi bagian dalam hidupku dan memberikan proses serta pengalaman hidup yang sangat berarti.

Semoga Allah SWT melindungi, dan membalas semua kebaikan yang sudah kalian berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita dan semua pihak lainnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2022
Penulis

Putri Albashita

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Peranan.....	8
2.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11
2.2.1 Tugas dan Wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .	11
2.2.2 Struktur Organisasi	13
2.3 Tinjauan Tentang Pengembangan	14
2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	15
2.5 Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM	20
2.6 Penelitian Terdahulu	22
2.7 Kerangka Pikir.....	24
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Tipe Penelitian.....	26
3.2 Lokasi Penelitian	26
3.3 Fokus Penelitian	27
3.4 Informan Penelitian	27
3.5 Jenis Data	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	29
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 KeadaanUmum Kabupaten Pringsewu.....	31
4.1.1 Sejarah Kabupaten Pringsewu	31
4.1.2 Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu	32

4.1.3 Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Pringsewu.....	33
4.1.4 Demografi Penduduk Kabupaten Pringsewu	34
4.2 KeadaanUmum Kecamatan Pringsewu	36
4.2.1 Profil Kecamatan Pringsewu	36
4.2.2 Luas Wilayah dan Keadaan Geografis Kecamatan Pringsewu.....	37
4.2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Pringsewu.....	38
4.2.4 Demografi Penduduk Kecamatan Pringsewu	39
4.2.5 Fasilitas Umum di Kecamatan Pringsewu	41
4.2.6 Etnis atau Suku	44
4.2.7 Banyak Rumah Makan dan Industri Makanan dan Minuman	44

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Profil Informan	48
5.2 Hasil Penelitian	53
5.2.1 Peranan BAPPEDA dalam pengembangan UMKM	53
5.2.2 Dampak pengembangan UMKM bagi pelaku usaha perdagangan di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu	65
5.3 Pembahasan	72
5.3.1 Peranan BAPPEDA dalam pengembangan UMKM	72
5.3.2 Hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pengembangan UMKM.....	77
5.3.3 Keadaan UMKM sebelum dan sesudah dilakukannya pengembangan terhadap UMKM.....	80

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	85
6.2 Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rekapitulasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018	3
Tabel 2. Klasifikasi UMKM berdasarkan UU No. 20/2008	18
Tabel 3. Karakteristik UKM Menurut UU No 20 tahun 2008	19
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 5. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019	33
Tabel 6. Rekapitulasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018	33
Tabel 7. Jumlah Penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 dan 2019	35
Tabel 8. Luas Kecamatan Pringsewu berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2020.	37
Tabel 9. Jumlah Penduduk Kecamatan Pringsewu berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019	40
Tabel 10. Pemeluk Agama Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pringsewu Tahun 2019	40
Tabel 11. Sarana Ibadah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pringsewu Tahun 2019	41
Tabel 12. Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pringsewu Tahun 2019	42
Tabel 13. Banyaknya Sarana Pendidikan di Kecamatan Pringsewu Tahun Ajaran 2020/2021	43
Tabel 14. Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pringsewu	44
Tabel 15. Banyaknya Industri Pengolahan Bahan Makanan dan Minuman Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pringsewu Tahun 2020	45

Tabel 16. Data Informan Penelitian	53
Tabel 17. Dampak yang dirasakan pelaku usaha di Kecamatan Pringsewu	72
Tabel 18. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pringsewu (miliar rupiah) Tahun 2017-2021.....	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi BAPPEDA	13
Gambar 2. Kerangka Pikir.....	25
Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan Pringsewu, 2020.	38
Gambar 4. Uraian peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengembangan UMKM	65
Gambar 5. Peneliti bersama Informan DZ	95
Gambar 6. Peneliti bersama Informan SU	95
Gambar 7. Peneliti bersama Informan OK.....	96
Gambar 8. Peneliti bersama Informan CY.....	96
Gambar 9. Peneliti bersama Informan WS	96
Gambar 10. Peneliti bersama Informan AI	97
Gambar 11. Peneliti bersama Informan RC	97
Gambar 12. Peneliti bersama Informan DF	97

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak akan terpisah dari peran serta pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Pemerintah telah berupaya untuk memajukan pembangunan di daerah salah satunya yaitu dengan dibentuknya otonomi daerah. Melalui dibentuknya otonomi daerah, saat ini Kepala Daerah mempunyai hak dan wewenang sendiri untuk mau bagaimana merencanakan pembangunan yang ingin dicapai dan sesuai dengan keadaan di daerahnya masing-masing melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, seorang Kepala Daerah dibantu untuk menentukan arah kebijakan dan implementasi di bidang perencanaan pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan suatu lembaga non departemen yang memiliki tanggung jawab dan koordinasi langsung kepada Kepala Daerah. Selain itu, BAPPEDA merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang keberadaannya juga sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam perannya sendiri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dengan kata lain, BAPPEDA adalah sebuah ruang yang membutuhkan partisipasi dan peran

serta masyarakat dalam memberikan masukan-masukan sebagai wujud masyarakat dalam mendukung proses pembangunan daerah.

Berbicara mengenai pembangunan daerah tentunya tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Kian hari masyarakat dituntut untuk lebih kreatif dan bisa bersaing dalam ekonomi yang perkembangannya semakin pesat. Ekonomi merupakan salah satu penunjang terciptanya kesejahteraan sosial. Namun, tidak dapat dipungkiri juga perekonomian dapat menyebabkan berbagai masalah. Untuk itu, dibutuhkan juga peranan-peranan dari sektor lain, bukan hanya dari pelaku usaha namun dibutuhkan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang berpihak pada pelaku ekonomi dari berbagai golongan. Mulai dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM.

UMKM adalah suatu usaha yang independen, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) berdasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara. (Tulus Tambunan, 2012)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah jenis unit usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. UMKM bisa meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menambah pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah agar tidak terjadi kesenjangan dan mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha, keterampilan pengelolaan usaha sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha dari pemerintah untuk masyarakat dan dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Dalam melakukan penguatan pada struktur perekonomian nasional perlu melakukan pemberdayaan pada UMKM yang strategis dan mengantisipasi masalah yang ada untuk menguatkan ekonomi kedepannya. Ketika adanya krisis ekonomi tentu akan berdampak pada stabilitas nasional dan akan berimbas pada usaha-usaha besar tak

terkecuali di sisi lain justru UMKM dapat bertahan dengan keterbatasan dan kemampuan di saat situasi krisis ekonomi.

Setelah krisis ekonomi tahun 1998, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi sangat strategis karena terbukti mampu menghadapi krisis. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah UMKM setelah krisis tahun 1998, jumlah UMKM semakin bertambah. Komitmen pemerintah di tunjukan dengan terbitnya UU no 20 tahun 2008 mengenai UMKM yang kemudian diikuti dengan kebijakan dan paket ekonomi yang mendorong pertumbuhan UMKM. (Kusnindar, 2018)

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu sebagai berikut :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Tabel 1. Rekapitulasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018

NO.	KECAMATAN	JUMLAH UNIT USAHA			JUMLAH JENIS USAHA (Sektor)			OMSET/THN (dalam juta rupiah)
		Mikro	Kecil	Menengah	Jasa	Perdagangan	Industri	
1.	PRINGSEWU	1059	244	29	71	739	522	111.039.97
2.	GADINGREJO	643	202	9	60	597	197	60.049.62
3.	BANYUMAS	304	114	0	20	312	86	30.268.80
4.	PAGELARAN	378	31	1	146	254	19	19.330.92
5.	SUKOHARJO	178	57	2	25	182	30	17.069.22
6.	AMBARAWA	165	66	0	18	122	91	16.428.60
7.	PARDASUKA	101	35	0	10	112	14	11.666.70
8.	ADILUWIH	216	19	1	31	181	24	11.373.75
9.	PAGELARAN UTARA	23	2	0	0	25	0	1.116.90
	JUMLAH	3076	770	42	382	2524	931	278.344.48

Sumber :Diskoperindag, Maret 2018.

Berdasarkan tabel 1, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki 9 kecamatan dan mempunyai 3.888 unit UMKM. Jumlah UMKM yang ada di Kecamatan Pringsewu adalah jumlah terbesar di banding kecamatan lain. Dengan jumlah UMKM sebanyak 1332 unit usaha, yang terdiri dari 1059 unit usaha mikro, 244 unit usaha kecil dan 29 unit usaha menengah. Dari data tersebut 71 bergerak di bidang jasa, 739 unit usaha perdagangan dan 522 merupakan industri. Kabupaten Pringsewu mempunyai porsi industri kecil yang sangat besar, hampir seratus persen industri yang ada di Kabupaten Pringsewu adalah industri mikro, kecil dan menengah yang terbagi kedalam Industri agro dan non agro. Industri agro sebagian besar terdiri dari industri makanan kecil, pembuatan tahu, tempe dan penggilingan padi. Sedangkan industri non agro, jumlah unit usaha terbesar adalah usaha pembuatan genteng, diikuti dengan pembuatan bata merah dan kerajinan kain perca. Keenam, industri kecil ini bahkan mampu menyerap 18% dari semua tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pringsewu. (Kusnidar, 2018)

Meskipun demikian, pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu masih banyak dijumpai kendala yang dihadapi seperti kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah, rendahnya tingkat kesejahteraan pelaku UMKM, lokasi usaha atau berjualan UMKM yang kadang mengganggu ketertiban umum, peran sistem pendukung kurang optimal, kebijakan dan peraturan yang kurang efektif. Kelemahan yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari usaha mikro terdiri dari dua faktor, yaitu :

1. Faktor Internal

Merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya: masih terbatasnya kemampuan sumber dayam manusia, kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil, kendala permodalan usaha sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil

2. Faktor Eksternal

Merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpangtindih.

Padahal UMKM sendiri memiliki potensi pengembangan dengan adanya perubahan perekonomian yang semula bergantung pada sumber daya alam kemudian bergerak ke perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Ini membuat peluang bagi UMKM untuk mengandalkan produk berbasis keterampilan, ilmu pengetahuan dan inovasi. Untuk itu, pemerintah memiliki peranan sebagai institusi tertinggi berwenang .melakukan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan publik maupun kesejahteraan pelaku usaha.

Dari perkembangan UMKM tersebut, upaya yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah untuk ikut dalam meningkatkan kualitas UMKM di masa yang akan datang adalah meningkatkan akses informasi terkait pengembangan UMKM, penyediaan modal oleh pemerintah dan lembaga keuangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari segi pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pringsewu sebagai lembaga pemerintahan daerah di tuntut untuk menyusun perencanaan pengembangan daerah termasuk pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu dalam bentuk RPJMD Kabupaten Pringsewu. Agar perencanaan tersebut dapat tercapai, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Pringsewu ditunjuk untuk melaksanakan rencana pengembangan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pringsewu. Karena Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Pringsewu paling berperan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu.

Oleh karena itu, perkembangan UMKM tidak lepas dari pengaruh dan campur tangan pemerintah. Baik dari segi merencanakan pengembangannya maupun dari segi memberikan dukungan dalam peningkatan kinerjanya. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, bagaimana peran pemerintah

merencanakan pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu. Karena itu, penulis mengangkat ketertarikan tersebut dalam penelitian ini dengan judul “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu” (Studi di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjelaskan :

1. Bagaimana Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya peran BAPPEDA dalam pengembangan UMKM bagi pelaku jenis usaha perdagangan Di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan :

1. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Pringsewu.
2. Dampak yang ditimbulkan dari adanya peran BAPPEDA dalam pengembangan UMKM bagi pelaku unit usaha perdagangan di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis : Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam hidup agar dapat menjalankan pentingnya membuka usaha dalam menekan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan.
2. Secara praktis : Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan serta pengenalan terhadap peneliti selanjutnya tentang bagaimana peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam

pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu. Agar dapat dijadikan kedepannya sebagai bahan dalam pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut tentang peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Pringsewu dan dapat dijadikan bahan refrensi untuk peneliti selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Peranan

Menurut Soerjono Soekanto (2002), Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya, jadi ia telah melakukan peranan. Sedangkan status adalah kumpulan hak dan kewajiban individu apabila telah melakukan hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, jadi ia telah menjalankan fungsinya. Peran juga dapat disebut sebagai rangkaian perilaku pada jabatan. Kepribadian seseorang bisa mempengaruhi dalam menjalankan peran.

Peran adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan status sosial. Syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang terhubung dengan posisi masyarakat.
2. Peran adalah konsep perilaku yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat disebut sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu yang ada karena jabatan. Peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan itu menjalankan peranan tersebut.

Sedangkan menurut Riyadi (2002) peran adalah orientasi dan konsep yang dimainkan oleh pihak dalam oposisi sosial. Melalui peran itu, individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan lingkungan. Peran juga disebut sebagai tuntutan struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan

seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Dari beberapa pendapat tersebut tentunya sejalan dengan pemikiran peneliti bahwa peran merupakan sikap yang diinginkan oleh banyak orang atau sekelompok orang yang memiliki status atau kedudukan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan BAPPEDA, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang BAPPEDA.

Selanjutnya Soerjono Soekanto (2002) dalam bukunya, menyebutkan macam-macam peranan yang ada pada individu atau kelompok, bahwasanya:

1. Peranan harus dilakukan jika struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut melekat pada individu yang dianggap mampu oleh masyarakat, terlatih dan menjadi pendorong untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat terkadang dijumpai individu yang tidak mampu menjalankan peranannya, oleh karena pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang banyak dari kepentingan pribadi.
4. Apabila semua orang sanggup dan bisa melakukan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terlaksana membatasi peluang-peluang tersebut.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Bentuk-bentuk peranan menurut Soerjono Soekanto (2001) :

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang berdasar pada norma di masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya berlaku di sistem.

Dari beberapa pengertian tentang peranan di atas, dapat disimpulkan bahwapernan merupakan suatu sikap, perbuatan ataupun perilaku dalam situasi tertentu yang diharapkan oleh individu atau sebagian orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan sosial tertentu. Apabila dikaitkan dengan lembaga, peran bukan sebagai suatu hak dan kewajiban dari individu, melainkan adalah tugas dan fungsi sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Jika melihat dari tinjauan bentuk-bentuk peranan menurut Soerjono Soekanto tersebut di atas maka peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Peranan normatif, dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringewu menjalankan seperangkat norma yang berlaku dalam kelembagaannya yang memfokuskan dalam perencanaan program pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu.
2. Peranan ideal, dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringewu menjalankan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu.

2.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.2.1 Tugas dan Wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintah Daerah.

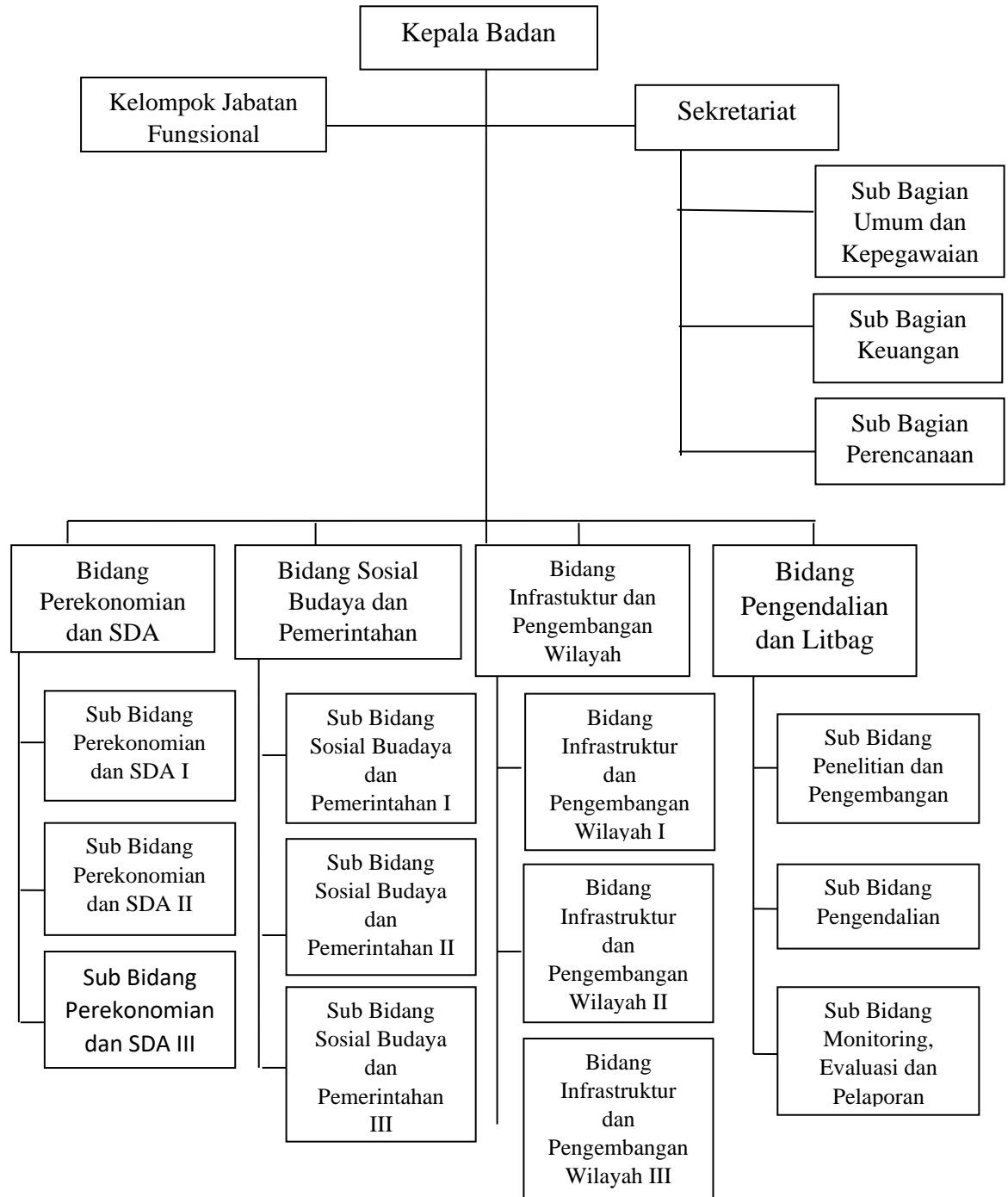
Dalam menyelenggarakan tugas Bappeda mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan mulai dari strategi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) serta sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan jangka

- pendek, menengah dan panjang serta harmonisasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- c. Pengkoordinasian dan sinergitas perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat serta swasta dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional;
 - d. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, pusat-pusat kajian atau lembaga penelitian dalam mengembangkan potensi dan daya saing daerah;
 - e. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD);
 - f. Pengendalian dan evaluasi konsistensi dan kesesuaian program dan kegiatan pada RPJMD dengan RKPD dan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - g. Pengendalian dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - h. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset dan ketatausahaan Bappeda; dan
 - i. Pelaporan, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2.2 Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu



Gambar 1. Struktur Organisasi BAPPEDA

2.3 Tinjauan Tentang Pengembangan

Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan kemampuan sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri (Iskandar Wiryokusumo dalam Afrilianasari, 2014). Pengembangan adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karier dan peningkatan oleh departemen personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi (Wardana, 2012).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan, pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.

Amin Widjaja Tunggal dalam Dani memberikan pengertian bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan organisasi untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang mengacu pada kemampuan meningkatkan daya tanggap organisasi terhadap lingkungan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Sedangkan menurut Moekijat, pengembangan adalah usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberi keterangan, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. (Dani Danuar Tri, 2013)

Pendapat lain tentang pengembangan menurut menurut Tessmer dan Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan. (Hasibuan, 2012) Dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, Konseptual, dan Moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. Sedangkan, menurut Seels & Richey (Alim Sumarno, 2012) pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha, proses, cara atau perbuatan mengembangkan yang dilakukan secara sadar, terencana dan terarah untuk membuat atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas lebih maju, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan dan mendukung serta meningkatkan kualitas sebagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna dari pada sebelumnya.

2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 dari UU, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Tambunan (2012) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Perbedaan antara Pembiayaan Ultra Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) pada umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan industri yang berbasis ekonomi kerakyatan yang hampir semua lapisan masyarakat dapat terlibat didalamnya.

UMKM merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Meskipun begitu, kadang banyak dijumpai kendala yang dihadapi UMKM seperti rendahnya tingkat kesejahteraan pelaku UMKM, lokasi usaha atau berjualan UMKM yang kadang mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Untuk itu, pemerintah memiliki peranan sebagai institusi tertinggi berwenang melakukan pemberdayaan yang dapat meningkatkan baik kesejahteraan publik maupun kesejahteraan pelaku UMKM. (Kurniawati, 2010)

2. Kriteria UMKM

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008, ada tiga kriteria yaitu kriteria Usaha Mikro, kriteria Usaha Kecil dan kriteria Usaha Menengah, sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah untuk yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah untuk yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah untuk yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut keputusan Menteri keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil ialah Usaha perorangan atau badan usaha yang sudah melakukan usaha dan memiliki penghasilan atau omset per th paling besar Rp 600.000.000 atau asset (aktiva) Rp 600.000.000 (belum termasuk tanah dan bangunan usaha). Contohnya seperti Koperasi, Firma, CV dan PT yang merupakan bentuk badan usaha. Sedangkan contoh usaha perorangan seperti pengrajin industri rumah tangga, nelayan, peternak, penjual barang dan jasa dan yang lainnya.

3. Klasifikasi UMKM

Pada perkembangannya kelompok usaha yang mempunyai jumlah paling besar terbukti tahan pada berbagai macam masalah salah satunya seperti krisis ekonomi. Maka dari situ kelompok UMKM harus bekerja sama antar kelompok untuk menguatkan satu sama lain. Beberapa klasifikasi UMKM:

- a. *Livelihood Activities*, ialah UMKM yang berguna untuk peluang usaha untuk mencari nafkah atau sektor informal. Contohnya ialah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, ialah UMKM yang memiliki kreatifitas namun kurangnya sifat kewirausahaan.

- c. *Small Dynamic Enterprise*, ialah UMKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan sanggup menerima pekerja subkontrak sampai ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, ialah UMKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan salah satu UMKM yang akan melakukan perubahan dari usaha kecil berubah ke usaha besar.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dijelaskan mengenai Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

Tabel 2. Klasifikasi UMKM berdasarkan UU No. 20/2008

Ukuran Usaha	Asset	Omset
Usaha Mikro	Minimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	Maksimal 3 Miliar
Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5-5 Miliar

Sumber : UU No. 20 Tahun 2008

4. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia memiliki pasar luas dan berpotensi untuk mudah dikembangkan, sumber daya manusia sangat besar dan bahan baku mudah diperoleh yang merupakan faktor pendukung untuk berkembangnya usaha kecil. Namun disini perlu melakukan beberapa hal dalam perkembangan usaha kecil rumahan seperti: pengelolaan manajemen yang baik untuk perkembangan usaha, meminimalisir kegagalan melalui perencanaan yang baik, pengetahuan dan penguasaan dapat menjadi penunjang usaha yang keberlanjutan, efisien dan efektif dalam melakukan produksi, dan untuk mendapatkan keberhasilan perlu adanya inovasi dan terobosan baru dalam mengelola suatu usaha.

Pandji Anaroga (2002) dalam bukunya dijelaskan secara umum tentang karakteristik sektor usaha sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan administrasi sederhana dan tidak mengikuti aturan pembukuan administrasi standar dan tidak *up to date* sehingga kinerjanya tidak berjalan dengan baik.
- b. Margin usaha yang tidak dapat mengikuti persaingan pasar.
- c. Modal minimal.

- d. Pengelolaan usaha dan pengalaman manajerial sangat minim.
- e. Tidak mampu menekan biaya untuk jangka panjang karena skala ekonomi yang terlalu kecil.
- f. Kurangnya kemampuan negoisasi dan manajemen pemasaran.
- g. Sistem administrasi yang terbatas sehingga hanya mendapatkan sumber dana dari pasar modal terndah. Perusahaan harus transparan dan mengikuti sistem administrasi untuk dapat bergabung dipasar modal.

UU No 20 tahun 2008 juga mengklasifikasikan UMKM kedalam beberapa kategori yaitu berdasarkan karakteristik UMKM. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukan karakteristik UMKM :

Tabel 3. Karakteristik UKM Menurut UU No 20 tahun 2008

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti. 2. Tempat usahanya tidak selalu menetap;sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun. 4. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 5. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 6. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah. 7. Umumnya belum mempunyai akses ke perbankan, namun mempunyai akses ke lembaga keuangan non bank. 8. Umumnya tidak memiliki ijin usaha atau legalitas lain. 9. Contohnya usaha perdagangan kaki lima dan pedagang di pasar.
Usaha Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap dan tidak gampang berubah. 2. Tempat usaha/lokasi pada umumnya tidak berpindah pindah. 3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. 4. Keuangan perusahaan sudah mulai di pisahkan dengan keuangan keluarga. 5. Sudah membuat neraca usaha. 6. Sudah memilki ijin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha. 8. Sebagian besar sudah memiliki akses ke perbankan. 9. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. 10. Contoh pedagang grosir.
Usaha Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi. 2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian oleh perbankan. 3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. 4. Sudah memiliki akses kepada sumber sumber pendanaan perbankan. 5. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih. 6. Contoh usaha pembuatan kerajinan dengan skala ekspor.

Sumber :UU No 20 tahun 2008

2.5 Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM

Menurut Gede Diva (2009), dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator:

1. Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk agar dapat mencapai tujuan pengembangan usaha UMKM. Jika UMKM memiliki kekurangan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Begitupun jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari solusi agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa, pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang

atau subsidi barang atau jasa. Kedua, keistimewaan, baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga, kebijaksanaan yang tersendiri. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah memandang keberadaan UMKM yang akan diberi fasilitas.

2. Peran Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga memudahkan usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.

3. Peran Pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti halnya sebuah katalis, pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak lagi secara alami. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif,

penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir. (Gede Diva, 2009)

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penjelasan secara singkat mengenai kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Fungsi dari telah pustaka adalah sebagai acuan dalam melakukan penelitian agar dapat mengarahkan pada penelitian lain yang akan mengembangkan khasanah dalam ilmu pengetahuan.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Metode	Hasil
Muhamad Bohori (2019) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan UMKM Unggulan di Surabaya	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Koperasi dan UMKM sangat penting bagi pengembangandan pembangunan sektor ekonomi,karena adanya peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah awal yang akan diambil guna melaksanakan pembangunan dalam sektor ekonomi. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM yang sebagai fasilitator tidak hanya mengatur, mengawasi, dan menindaklanjuti melainkan peran dari dinas koperasi ini juga memberikan sarana dan prasarana, memberikan pelatihan keterampilan dan pemasaran. Hal ini agar bisa mempercepat pergerakan dalam sektor ekonomi dengan kebijakan yang disusun oleh pemerintah.
Khoirul Anam (2019) Universitas Diponegoro	Strategi Pemerintah dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan model dan dimensi strategi pemerintahan, hasil analisa observasi serta wawancara dengan narasumber yang dilakukan oleh peneliti berpendapat bahwa strategi pengembangan UMKM di Jepara termasuk dalam model strategi progresif. Strategi yang berhasil

			<p>dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dan strategi tersebut memiliki dampak positif adalah integrasi ke depan, penetrasi pasar, pengembangan pemasaran, pengembangan produk dan juga diversifikasi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah industri di tahun 2018 mencapai 19.551 industri. Selain itu Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki peran sebagai fasilitator yakni memfasilitasi apa yang dibutuhkan pelaku UMKM, peran sebagai regulator yakni membuat kebijakan yang mempermudah usaha UMKM, dan peran sebagai katalisator yakni mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi <i>fast moving enterprise</i>.</p>
<p>Dewi Wuryandani dan Hilma Meilani (2013)</p>	<p>Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perdagangan dalam negeri sangat potensial karena letak Daerah Istimewa Yogyakarta yang strategis sebagai penghubung antara wilayah Jateng Selatan, yaitu Magelang, Klaten, Purworejo, dan sekitarnya, dan Jatim wilayah Barat yaitu Pacitan dan hal ini membuat potensi dan peluang yang cukup besar terbuka bagi UMKM di wilayah Yogyakarta. Potensi itu didukung dengan jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 3,5 juta orang merupakan potensi pasar yang cukup bagus karena banyak UMKM yang sangat kreatif dalam mengembangkan usahanya. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pusat berkembangnya industri kreatif yang sangat mendukung untuk kegiatan perdagangan, memiliki infrastruktur jalan yang cukup memadai. Namun disini untuk pemberdayaan di usaha mikro masih membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah daerah, sehingga bisa dapat berkembang ke jenjang usaha berikutnya (menuju tingkat usaha kecil, menengah dan besar).</p>

Sumber : Data olahan, 2022.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu mengambil pembahasan mengenai peranan Lembaga Pemerintah dalam melakukan pengembangan UMKM dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada Lembaga Pemerintahan dan variabel penelitian berbeda yaitu pada penelitain Muhamad Bohori (2019), menjelaskan tentang penelitian “Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan UMKM Unggulan di Surabaya”, pada penelitian Khoirul Anam (2019), menjelaskan tentang penelitian “Strategi Pemerintah dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara”, dan pada penelitian Dewi Wuryandani dan Hilma Meilani (2013), menjelaskan tentang penelitian “Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan tentang “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu” dan tahun periode penelitian serta tempat penelitian berbeda.

2.7 Kerangka Pikir

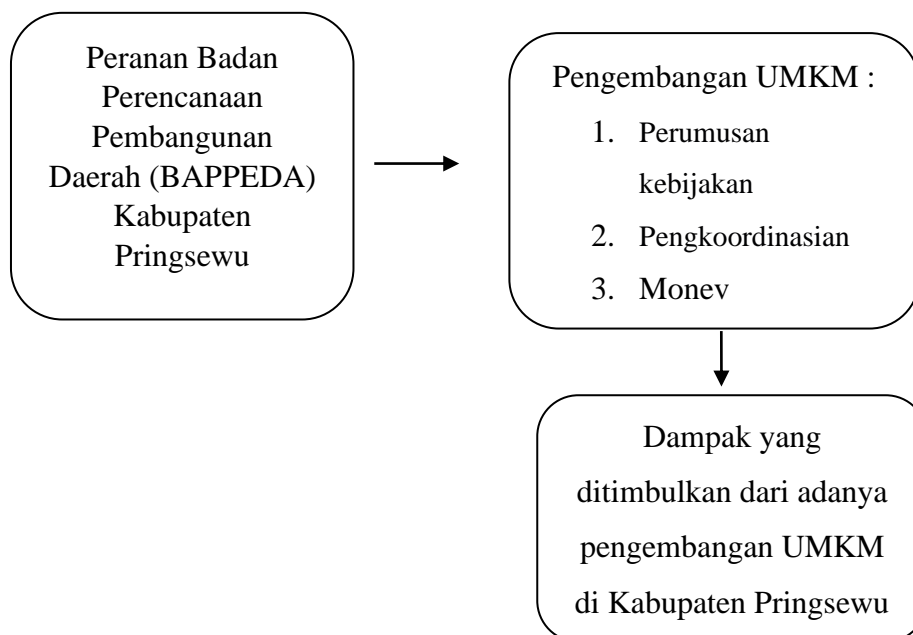
Dalam melakukan penguatan pada struktur perekonomian nasional perlu melakukan pengembangan pada UMKM yang strategis dan mengantisipasi masalah yang ada untuk menguatkan ekonomi kedepannya. Posisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) cukup dominan dalam perekonomian Indonesia dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan (Sofyan 2017).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori peran. Teori peran (*Role Theory*) merupakan teori yang berasal dari dunia teater, yang mana para aktor dan aktris, berperan sesuai dengan harapan penontonnya. Suatu peran dapat dipelajari oleh individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran

tertentu dalam sistem sosial. Dalam teori peran, ada istilah yang dikenal dengan posisi peran (*role position*). Artinya, sekelompok orang yang memperlihatkan atribut yang sama, perilaku yang sama, dan memperlakukan dengan cara yang sama dari anggota masyarakat lainnya.

Teori peran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Soerjono Soekanto dimana dalam teori tersebut disebutkan bahwa peran merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Maka apabila dikaitkan dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti terdapat kesamaan tentang kedudukan atau status dan tentang hak dan kewajiban, yaitu kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu. Dan tentunya perkembangan UMKM tidak lepas dari pengaruh dan campur tangan pemerintah, baik dari segi merencanakan pengembangannya maupun dari segi memberikan dukungan dalam peningkatan kinerjanya. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pringsewu sebagai lembaga pemerintahan daerah diuntut untuk menyusun perencanaan pengembangan daerah termasuk pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut (Kirk dan Miler 1986) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam dunia ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam wilayahnya ataupun istilahnya. Penelitian kualitatif merupakan suatu upaya menyajikan dunia sosial, dan perspektif dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Sedangkan menurut Moleong (2005) alat pengumpulan data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif ialah penelitian sendiri, sehingga penelitian harus terjun sendiri kelapangan secara aktif.

Teknik pengumpulan data yang sering digunakan ialah observasi penelitian, wawancara dan dokumentasi. Alasan menggunakan metode deskriptif kualitatif karena dengan menggunakan metode penelitian kualitatif informasi didapatkan secara mendetail dan lebih dalam sehingga permasalahan yang terjadi dilapangan dapat difokuskan dan penelitian kualitatif membantu penulis untuk memaparkan lebih banyak informasi karena metode yang digunakan berupa wawancara dan observasi langsung saat melakukan penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti obyek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih untuk penelitian adalah pada Kantor Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu yang mempunyai tugas pokok serta fungsi peranan sebagai lembaga teknis daerah yang menyusun dan merumuskan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Termasuk perencanaan untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu. Serta pada beberapa unit usaha perdagangan yang ada di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

3.3 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2005) fokus penelitian penting untuk membatasi masalah studi dan penelitian, sekaligus membatasi peneliti guna memilih mendata yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Berdasarkan pengertian tersebut maka fokus penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan tentang :

1. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu.
2. Dampak dari adanya pengembangan UMKM bagi pelaku jenis usaha perdagangan di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

3.4 Informan Penelitian

Informan Penelitian merupakan salah satu anggota suatu kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah serta penerjemah pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat secara langsung. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*, yaitu suatu teknik sample secara subjektif dengan tujuan atau maksud tertentu, yang menganggap bahwa suatu informan yang diambil tersebut memiliki informan yang diperlakukan bagi penelitian yang sedang dilakukan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pringsewu yaitu Kepala Bidang Perekonomian dan SDA.
2. Pelaku usaha atau pemilik UMKM unit usaha perdagangan di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

3.5 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber peneliti atau lokasi penelitian, yaitu dengan wawancara dengan informan penelitian.
2. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian, seperti buku, majalah, atau literatur lain.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penggalian informasi yang telah ditentukan peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data agar informasi yang didapat bisa lebih lengkap, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Sugiyono (2006) observasi adalah proses yang kompleks, yaitu suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi karena penelitian ini berkenaan dengan perilaku manusia, proses dan gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Pringsewu.

2. Wawancara

Menurut Cholid Narkubo (1997). Wawancara adalah proses mengumpulkan data dengan tanya jawab. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Cholid, Abu ahmadi berpendapat bahwa wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian baik lisan atau tulisan antara dua orang atau lebih bertatap muka untuk mencari informasi dan informan.

Berdasarkan prosedur wawancara ada 3 jenis wawancara, yaitu:

- a. Wawancara bebas
- b. Wawancara terpimpin
- c. Wawancara bebas terpimpin

Berdasarkan jenis wawancara diatas peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara boleh dilakukan peneliti baik secara mendalam namun masih dalam satu garis besar pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan ditanyakan oleh peneliti. Peneliti memilih teknik wawancara ini karena pada saat penelitian dan wawancara dilakukan tidak menutup kemungkinan peneliti akan menggali lebih jauh tentang topik yang akan diteliti.

3. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan mengambil hal yang penting dari buku, jurnal, artikel atau literatur lain yang berhubungan dengan topik bahasan dan tentunya yang dapat berguna dalam mempermudah proses penelitian yang akan dilakukan peneliti. Disini peneliti banyak mempelajari buku yang berhubungan dengan sosiologi ekonomi dan banyak literature berita dari sumber internet serta masyarakat yang tentu saja sangat membantu peneliti dalam usaha menyelesaikan penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang ditemukan dilapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data yang didapat dari hasil wawancara serta hasil dokumentasi, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan kedalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema yang inti dan polannya disusun secara sistematis. Data yang direduksi memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

2. Menampilkan Data

Dalam tahap ini peneliti berusaha menampilkan data yang relevan kalimat-kalimat yang didapat dari proses penggalian informasi di lapangan, sehingga

menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Data yang ditampilkan harus jelas agar pembaca mengerti apa yang coba ditampilkan, peneliti akan menampilkan data berupa hasil wawancara yang dilakukan sehingga pembaca menjadi tahu tentang penelitian ini.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data dalam tahapan ini peneliti akan menyimpulkan semua data yang diperoleh dari proses penelitian. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari tahapan-tahapan sebelumnya yaitu reduksi data dan menampilkan data secara jelas. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung, dalam hal ini dengan cara penambahan data baru.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Umum Kabupaten Pringsewu

4.1.1 Sejarah Kabupaten Pringsewu

Sejarah Pringsewu diawali dengan berdirinya sebuah perkampungan (tiyuh) bernama Margakaya pada tahun 1738, yang dihuni masyarakat asli Lampung-Pubian yang berada di tepi aliran sungai Way Tebu (4 km dari pusat kota Pringsewu ke arah selatan saat ini). Kemudian 187 tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 9 November 1925, berdiri Desa Pringsewu, yang sebelumnya didahului dengan adanya sekelompok masyarakat dari Pulau Jawa serta sebagian berasal dari para kolonis Desa Bagelen, Gedongtataan, melalui program kolonisasi oleh pemerintah Hindia Belanda, yang membuka areal permukiman baru dengan membatasi hutan bambu yang cukup lebat di sekitar Tiyuh Margakaya tersebut. Karena begitu banyaknya pohon bambu di hutan yang mereka buka tersebut, oleh masyarakat desa yang baru dibuka tersebut itulah kemudian dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya Bambu Seribu atau bermakna wilayah yang banyak terdapat pohon bambu.

Setelah itu, pada tahun 1936 berdiri pemerintahan Kawedanaan Tataan yang berkedudukan di Pendopo Pringsewu, dengan wedana pertama yakni Bapak Ibrahim hingga 1943. Kemudian Kawedanaan Tataan berturut-turut dipimpin oleh Bapak Ramelan pada tahun 1943, Bapak Nurdin pada tahun 1949, Bapak Hasyim Asmarantaka pada tahun 1951, Bapak Saleh Adenan pada tahun 1957, serta pada tahun 1959 diangkat sebagai Wedana yaitu Bapak R. Arifin Kartaprawira yang merupakan Wedana terakhir hingga tahun 1964, saat pemerintahan Kawedanaan Tataan dihapuskan. Pada tahun 1964, dibentuk pemerintahan Kecamatan Pringsewu yang merupakan bagian dari wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, yang sebelumnya Pringsewu juga pernah menjadi bagian dari Kecamatan Pagelaran yang juga berkedudukan di Pringsewu.

Dalam sejarah perjalanan berikutnya, Kecamatan Pringsewu bersama sejumlah kecamatan lainnya di wilayah Lampung Selatan bagian barat yang menjadi bagian wilayah administrasi Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kota Agung, masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten Dati II Tanggamus berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 1997, hingga terbentuk sebagai daerah otonom yang mandiri bernama Kabupaten Pringsewu, melalui Undang-undang No.48 tahun 2008, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hi.Mardiyanto pada tanggal 3 April 2009 di Gedung Sasana Bhakti Praja Departemen Dalam Negeri di Jakarta, sekaligus pelantikan Penjabat Bupati Pringsewu pertama Bapak Ir.Hi.Masdulhaq.

4.1.2 Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, disamping masyarakat asli Lampung, yang terdiri dari masyarakat yang beradat Pepadun (Pubian) serta masyarakat beradat Saibatin (Pesisir). Dari segi luas wilayah, Kabupaten Pringsewu saat ini merupakan kabupaten terkecil, sekaligus terpadat di Provinsi Lampung. Pada awal pembentukannya, wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu memiliki 8 kecamatan, 96 pekon dan 5 kelurahan. Sesuai aspirasi masyarakat telah dilakukan beberapa kali pemekaran, baik pemekaran kecamatan maupun pekon, sehingga secara keseluruhan pada saat ini wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu mencakup 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Gadingrejo, Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, Kecamatan Banyumas dan Pagelaran Utara, memiliki 126 pekon dan 5 kelurahan dengan luas 625 km² atau 62.500 ha dan setara dengan 2% dari luas wilayah Provinsi Lampung. Adapun pembagian wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Pekon/Kelurahan	Luas(km ²)	Persentase
1.	Pardasuka	13	94,64	15,14 %
2.	Ambarawa	8	30,99	4,96 %
3.	Pagelaran	22	63,28	10,12 %
4.	Pringsewu	15	53,29	8,53 %
5.	Gadingrejo	23	85,71	13,71 %
6.	Sukoharjo	16	72,95	11,67 %
7.	Banyumas	11	39,85	6,38 %
8.	Adiluwih	13	74,82	11,97 %
9.	Pagelaran Utara	10	109,47	17,52 %
	Jumlah	131	625,00	100,00 %

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2020.

Letak wilayah Kabupaten Pringsewu berada pada posisi 104°45'25" sampai dengan 105°4'42" Bujur Timur dan 5°9'10" sampai dengan 5°34'27" Lintang Selatan, dengan letak yang strategis ini maka keberadaan Pringsewu sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa, yang dapat mendukung proses pembangunan.

4.1.3 Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Pringsewu

Tabel 6. Rekapitulasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH UNIT USAHA			JUMLAH JENIS USAHA (Sektor)			OMSET/THN (dalam juta rupiah)
		Mikro	Kecil	Menengah	Jasa	Perdagangan	Industri	
1.	PRINGSEWU	1059	244	29	71	739	522	111.039.97
2.	GADINGREJO	643	202	9	60	597	197	60.049.62
3.	BANYUMAS	304	114	0	20	312	86	30.268.80
4.	PAGELARAN	378	31	1	146	254	19	19.330.92
5.	SUKOHARJO	178	57	2	25	182	30	17.069.22
6.	AMBARAWA	165	66	0	18	122	91	16.428.60
7.	PARDASUKA	101	35	0	10	112	14	11.666.70
8.	ADILUWIH	216	19	1	31	181	24	11.373.75
9.	PAGELARAN UTARA	23	2	0	0	25	0	1.116.90
	JUMLAH	3076	770	42	382	2524	931	278.344.48

Sumber : Diskoperindag, Maret 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki 9 kecamatan dan mempunyai 3.888 unit UMKM. Jumlah UMKM yang ada di Kecamatan Pringsewu adalah jumlah terbesar di banding kecamatan lain. Dengan jumlah UMKM sebanyak 1332 unit usaha, yang terdiri dari 1059 unit usaha mikro, 244 unit usaha kecil dan 29 unit usaha menengah. Dari data tersebut 71 bergerak di bidang jasa, 739 unit usaha perdagangan dan 522 merupakan industri. Kabupaten Pringsewu mempunyai porsi industri kecil yang sangat besar, hampir seratus persen industri yang ada di Kabupaten Pringsewu adalah industri mikro, kecil dan menengah yang terbagi kedalam Industri agro dan non agro. Industri agro sebagian besar terdiri dari industri makanan kecil, pembuatan tahu, tempe dan penggilingan padi. Sedangkan industri non agro, jumlah unit usaha terbesar adalah usaha pembuatan genteng, diikuti dengan pembuatan bata merah dan kerajinan kain perca. Keenam, industri kecil ini bahkan mampu menyerap 18% dari semua tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pringsewu.

Dengan letak keberadaan Kabupaten Pringsewu yang strategis maka Kabupaten Pringsewu sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa, yang dapat mendukung proses pembangunan. Adanya perkembangan Pringsewu yang cukup signifikan, tentunya tidak terlepas dari masyarakatnya yang termotivasi untuk maju dan adanya rasa nyaman dari pelaku usaha dalam beraktivitas. Hal ini sekaligus menjadi daya tarik dari masyarakat yang berada di sekitarnya untuk berusaha. Letak Kabupaten Pringsewu yang strategis di jalur lintas barat yang merupakan salah satu jalur tersibuk di Provinsi Lampung menuju sejumlah provinsi di pantai barat Sumatera, membuat posisi Kabupaten Pringsewu sangat potensial untuk mengembangkan sektor perdagangan dan jasa, baik usaha perdagangan kecil, menengah maupun usaha perdagangan besar.

4.1.4 Demografi Penduduk Kabupaten Pringsewu

Secara umum demografi dapat diartikan sebagai kependudukan berarti ilmu yang mempelajari dinamika manusia berupa distribusi penduduk, struktur, dan jumlah penduduk yang berubah setiap tahunnya dikarenakan akibat kematian, kelahiran,

migrasi, dan penuaan. Selanjutnya, data penduduk disajikan dalam bentuk data resmi maupun tidak resmi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun yang bukan pemerintah serta ditampilkan berupa bentuk angka, tabel, grafik, dan lainnya. Dengan demikian, untuk mengetahui data demografi penduduk Kabupaten Pringsewu dapat disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah Penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 dan 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2018	Jumlah Penduduk 2019
1	Pardasuka	34.757	35.066
2	Ambarawa	34.592	34.852
3	Pagelaran	46.839	47.067
4	Pringsewu	83.216	84.088
5	Gadingrejo	73.967	74.482
6	Sukoharjo	48.814	49.315
7	Banyumas	20. 746	20.959
8	Adiluwih	35.275	35.540
9	Pagelaran Utara	15.695	15.850
	Jumlah	393.901	397.219

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk masing-masing Kecamatan pada tahun 2017 berjumlah 393.901 penduduk dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebanyak 397.219 penduduk. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu pada Kecamatan Pringsewu yang berjumlah 84.008 jiwa pada tahun 2018 kemudian disusul oleh Kecamatan Gadingrejo berjumlah 74.482 jiwa pada tahun 2018, Kecamatan Sukoharjo berjumlah 49.315 jiwa pada tahun 2018 dan Kecamatan Pagelaran berjumlah 47.067 jiwa pada tahun 2018. Sedangkan Kecamatan dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Pagelaran Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 yaitu 15.850 jiwa.

4.2 Keadaan Umum Kecamatan Pringsewu

4.2.1 Profil Kecamatan Pringsewu

Kecamatan pringsewu sendiri merupakan kecamatan yang berada pada Ibu kota Kabupaten Pringsewu dengan memiliki luas wilayah $\pm 53,26$ km². Memiliki 5 kelurahan dengan 10 pekon. Kelurahan di Kecamatan Pringsewu yaitu Kelurahan Fajaresuk, Pringsewu Barat, Pringsewu Selatan, Pringsewu Timur, dan Pringsewu Utara. Sedangkan pekon-pekon yang ada di Kecamatan Pringsewu yaitu Pekon Bumiaram, Bumiayu, Fajar Agung, Fajar Agung Barat, Margakaya, Podomoro, Rejosari, Sidoharjo, dan Waluyojati.

Berdasarkan Laporan Kependudukan Kecamatan Pringsewu tahun 2020, jumlah penduduk di Kecamatan Pringsewu berjumlah 81.776 jiwa yang terdiri dari 41.819 jiwa penduduk laki-laki dan 39.957 jiwa penduduk perempuan. Penduduk tersebut tersebar di seluruh desa atau kelurahan dengan kepadatan penduduk yaitu 1.707/km². Kemudian, presentasi penduduk di Kecamatan Pringsewu berdasarkan agama yang dianut yakni pemeluk agama Islam sebanyak 94,08%, kemudian Kristenan sebanyak 5,52%, dengan rincian Katolik 4,10% dan Protestan 1,42%. Pemeluk agama Buddha 0,26%, Hindu 0,13 dan lainnya 0,01%.

Di wilayah Kelurahan adalah wilayah yang sangat padat. Dengan wilayah yang tidak cukup luas, daerah kelurahan memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Permukiman yang ada di Kelurahan sangatlah padat. Hal ini disebabkan karena di daerah Kelurahan ini merupakan pusat ekonomi sehingga berdampak pada kepadatan penduduk dan banyaknya orang dari luar daerah yang pindah ke tempat ini. Untuk wilayah bagian utara seperti Podomoro, Podosari dan Rejosari kepadatan penduduk dipengaruhi oleh wilayah yang dekat dengan Kelurahan Pringsewu dan termasuk pintu gerbang Kecamatan Pringsewu. Penggunaan wilayah di daerah Kelurahan lebih dipusatkan untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan pemerintahan sedangkan untuk wilayah desa biasanya dipusatkan pada sektor pertanian dan industri.

4.2.2 Luas Wilayah dan Keadaan Geografis Kecamatan Pringsewu

Pada tahun 1964, dibentuk pemerintahan Kecamatan Pringsewu yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, yang sebelumnya Pringsewu juga pernah menjadi bagian dari Kecamatan Pagelaran yang juga berkedudukan di Pringsewu. memiliki luas wilayah $\pm 53,26$ km². Memiliki 5 Kelurahan dengan 10 pekon. Kelurahan di Kecamatan Pringsewu yaitu Kelurahan Fajaresuk, Pringsewu Barat, Pringsewu Selatan, Pringsewu Timur, dan Pringsewu Utara. Sedangkan pekon-pekon yang ada di Kecamatan Pringsewu yaitu Pekon Bumi Arum, Bumiayu, Fajar Agung, Fajar Agung Barat, Margakaya, Podomoro, Rejosari, Sidoharjo, dan Waluyoajati.

Dengan wilayah yang tidak cukup luas, daerah Kelurahan di Kabupaten Pringsewu memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Permukiman yang ada di Kelurahan sangatlah padat. Hal ini disebabkan karena di daerah Kelurahan ini merupakan pusat ekonomi sehingga berdampak pada kepadatan penduduk dan banyaknya orang dari luar daerah yang pindah ke tempat ini. Untuk wilayah bagian utara seperti Podomoro, Podosari dan Rejosari kepadatan penduduk dipengaruhi oleh wilayah yang dekat dengan Kelurahan Pringsewu dan termasuk pintu gerbang Kecamatan Pringsewu.

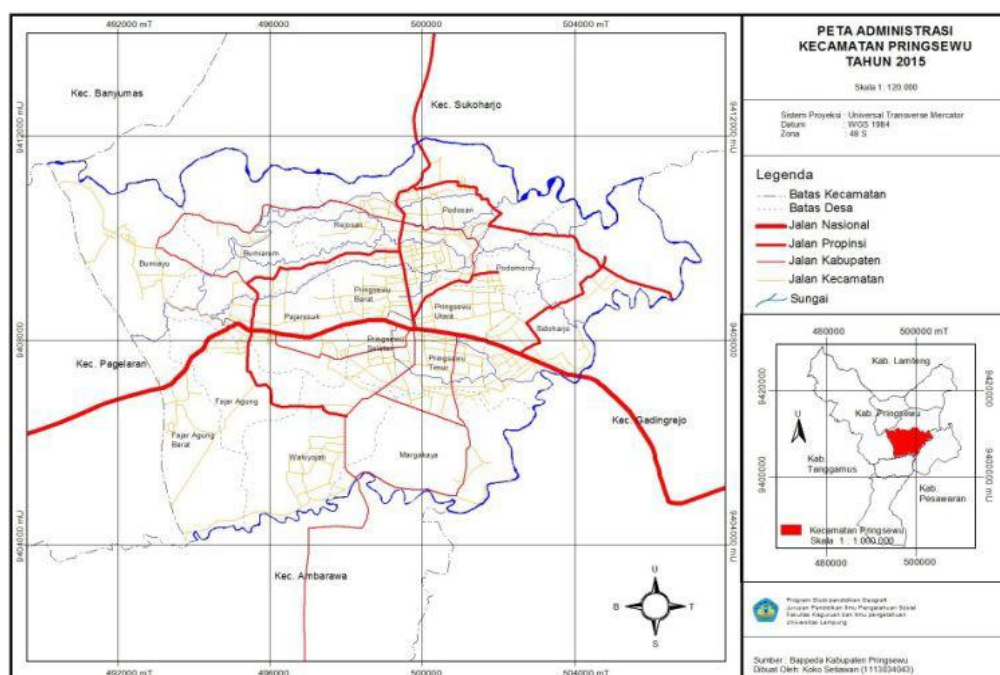
Tabel 8. Luas Kecamatan Pringsewu berdasarkan Desa/Kelurahan Tahun 2020

No.	Desa / Kelurahan	Luas (Ha)	Luas (Km ²)
1.	Margakaya	678	6,78
2.	Waluyoajati	400	4,00
3.	Pajar	510	5,10
4.	Sidoharjo	293	2,93
5.	Podomoro	304	3,04
6.	Bumi Arum	900	9,00
7.	Pajar Agung	233	2,33
8.	Pringsewu Utara	202	2,02
9.	Pringsewu Selatan	200	2,00
10.	Pringsewu Barat	202	2,02
11.	Pringsewu Timur	200	2,00
12.	Rejosari	241	2,41
13.	Bumi Ayu	541	5,41
14.	Podosari	210	2,10

15.	Fajar Agung Barat	215	2,15
	Luas Kecamatan	5329	53,29

Sumber : Data Kecamatan Pringsewu, 2021.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa luas kecamatan adalah 53,29 Km² dengan Desa atau Kelurahan terbesar di Kecamatan Pringsewu adalah Desa Bumi Arum yang memiliki luas 9,00 Km² atau 900 Ha. Sedangkan luas Desa atau Kelurahan terkecil yaitu Kelurahan Pringsewu Selatan dan Kelurahan Pringsewu Timur yang masing-masing hanya memiliki luas 2,00 Km² atau 200 Ha. Dari 15 Desa atau Kelurahan diKecamatan Pringsewu, perkembangan wilayah yang saat ini menunjukkan tingkat perkembangan pemukiman menonjol, berada di lima Kelurahan, yaitu di Kelurahan Pringsewu Selatan, Kelurahan Pringsewu Utara, Kelurahan Pringsewu Barat, Kelurahan Pringsewu Timur dan Kelurahan Pajaresuk.



Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan Pringsewu, 2020.

4.2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Pringsewu

Berdasarkan observasi peneliti dan data di Kecamatan Pringsewu memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak ada sebanyak 1332 unit usaha, yang terdiri dari 1059

unit usaha mikro, 244 unit usaha kecil dan 29 unit usaha menengah. Dari data tersebut 71 bergerak di bidang jasa, 739 unit usaha perdagangan dan 522 merupakan industri. Hal ini tentunya berkaitan dengan beberapa fasilitas yang ada di lokasi penelitian, sehingga dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut menjadikan kesempatan besar untuk para UMKM menarik para konsumen. Letak Kabupaten Pringsewu yang strategis di jalur lintas barat yang merupakan salah satu jalur tersibuk di Provinsi Lampung menuju sejumlah provinsi di pantai barat Sumatera, membuat posisi Kabupaten Pringsewu sangat potensial untuk mengembangkan sektor perdagangan dan jasa, baik usaha perdagangan kecil, menengah maupun usaha perdagangan besar.

UMKM yang bergerak dibidang kuliner yang paling banyak tersedia mengingat makanan merupakan kebutuhan dasar setiap individu. Daerah Kecamatan Pringsewu yang merupakan pusat dari Kabupaten Pringsewu menjadikan Kecamatan Pringsewu memiliki penduduk terpadat di Kabupaten Pringsewu yang menjadikannya sangat potensial untuk didirikan berbagai macam jenis usaha kuliner. Mulai dari usaha makanan ringan hingga makanan berat pun tersebar di area Kecamatan Pringsewu terutama yang berada di sekitar fasilitas pendidikan atau berdekatan dengan lokasi kampus, yaitu Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI), Pendopo Pringsewu dan sepanjang jalan Lintas Barat Sumatera. Pilihan tempat makan banyak tersedia, sehingga semua kalangan masyarakat tua hingga muda dengan mudahnya memilih usaha kuliner mana yang akan mereka pilih. Berdasarkan penelitian ini, peneliti telah mengambil informasi dari 7 informan pelaku usaha yang menjalankan usaha di bidang kuliner seperti rumah makan, seblak, angkringan, hingga makanan ringan seperti *snack* keripik kulit ikan, pisang tanduk krispi, salad buah dan sebagainya yang umumnya banyak dikonsumsi masyarakat umum.

4.2.4 Demografi Penduduk Kecamatan Pringsewu

Secara umum demografi dapat diartikan sebagai kependudukan berarti ilmu yang mempelajari dinamika manusia berupa distribusi penduduk, struktur, dan jumlah penduduk yang berubah setiap tahunnya dikarenakan akibat kematian, kelahiran,

migrasi, dan penuaan. Selanjutnya, data penduduk disajikan dalam bentuk data resmi maupun tidak resmi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun yang bukan pemerintah serta ditampilkan berupa bentuk angka, tabel, grafik, dan lainnya. Dengan demikian, untuk mengetahui data demografi penduduk Kelurahan Kampung Baru dapat disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah Penduduk Kecamatan Pringsewu berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No.	Pekon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Margakaya	2343	2161	4504
2.	Waluyojati	2293	2090	4383
3.	Pajar Esuk	3726	3610	7336
4.	Sidoharjo	3228	3034	6262
5.	Podomoro	2585	2427	5012
6.	Bumi Arum	1730	1551	3281
7.	Pajar Agung	1377	1281	2658
8.	Pringsewu Utara	4531	4429	8960
9.	Pringsewu Selatan	4919	4848	9767
10.	Pringsewu Barat	4756	4742	9498
11.	Pringsewu Timur	3490	3373	6863
12.	Rejosari	2173	2018	4191
13.	Bumi Ayu	933	848	1781
14.	Podosari	2290	2244	4534
15.	Fajar Agung Barat	1445	1301	2746
	Jumlah	41819	39957	81776

Sumber : Data Kecamatan Pringsewu, 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk pada seluruh Desa atau Kelurahan di Kecamatan Pringsewu tahun 2020 adalah 81776 penduduk. Jumlah penduduk terbanyak yaitu pada Kelurahan Pringsewu Selatan dengan jumlah 9767 penduduk, dengan perbandingan jumlah laki-laki 4919 penduduk dan jumlah perempuan 4848 penduduk.

Tabel 10. Pemeluk Agama Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pringsewu Tahun 2019

No.	Nama Desa/Kelurahan	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha
1.	Margakaya	5050	-	-	-	-
2.	Waluyojati	4149	-	23	3	28
3.	Pajar Esuk	7151	52	171	-	124
4.	Sidoharjo	6745	221	121	-	5
5.	Podomoro	5218	14	96	-	8

6.	Bumi Arum	3085	6	59	50	-
7.	Pajar Agung	2335	42	57	-	-
8.	Pringsewu Utara	8959	105	190	5	6
9.	Pringsewu Selatan	10029	113	265	33	27
10.	Pringsewu Barat	8561	187	1033	3	14
11.	Pringsewu Timur	7459	214	459	-	21
12.	Rejosari	3855	84	152	-	-
13.	Bumi Ayu	1329	-	53	-	-
14.	Podosari	4612	43	45	-	-
15.	Fajar Agung Barat	2135	21	73	-	-
	Jumlah	80677	1102	2797	94	233

Sumber : Data Kecamatan Pringsewu, 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Pringsewu pada setiap Desa atau Kelurahan menganut agama Islam dengan pemeluk sebanyak 80677 jiwa. Kemudian, disusul oleh agama Kristen Katholik sebanyak 2797 pemeluk, agama Kristen Protestan sebanyak 1102 pemeluk, agama Budha sebanyak 233 pemeluk dan agama Hindu sebanyak 94 pemeluk.

4.2.5 Fasilitas Umum di Kecamatan Pringsewu

Adapun fasilitas-fasilitas yang tersedia di Kelurahan Kampung Baru antara lain:

- a. Sarana Ibadah yang tersedia di Kecamatan Pringsewu adalah sebagaiberikut:

Tabel 11. Sarana Ibadah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pringsewu Tahun 2019

No.	Desa/Kelurahan	Masjid	Musholla	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Wihara
1.	Margakaya	6	8	-	-	-	-
2.	Waluyojati	5	7	-	-	-	-
3.	Pajar Esuk	10	10	-	1	-	-
4.	Sidoharjo	4	8	-	-	-	-
5.	Podomoro	5	8	-	-	-	-
6.	Bumi Arum	3	6	-	-	1	-
7.	Pajar Agung	3	3	1	-	-	-
8.	Pringsewu Utara	10	10	-	-	-	-
9.	Pringsewu Selatan	10	14	1	1	1	-
10.	Pringsewu Barat	11	15	1	1	-	-
11.	Pringsewu Timur	5	8	1	1	-	1
12.	Rejosari	6	6	2	-	-	-
13.	Bumi Ayu	2	6	-	-	-	-
14.	Podosari	4	5	-	-	-	-

15.	Fajar Agung Barat	7	2	-	-	-	-
Jumlah		91	116	6	4	2	1

Sumber : Data Kecamatan Pringsewu, 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kecamatan pringsewu memiliki fasilitas tempat peribadatan lengkap yang tersebar di setiap Desa atau kelurahannya mulai dari masjid, musholla, gereja, pura dan wihara. Musholla adalah sarana ibadah terbanyak yang ada di Kecamatan Pringsewu yaitu sebanyak 116 bangunan, kemudian disusul oleh banyaknya masjid yaitu 91 bangunan, gereja Kristen sebanyak 6 bangunan, gereja Katolik sebanyak 4 bangunan, pura 2 bangunan dan wihara ada 1 bangunan.

- b. Fasilitas kesehatan yang tersedia, sebagai berikut:

Tabel 12. Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pringsewu Tahun 2019

No.	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	Peskesmas	Puskesmas Pembantu	Praktek Dokter	Praktek Bidan	Posyandu
1.	Margakaya	-	-	-	-	2	3
2.	Waluyoajati	-	-	1	-	3	5
3.	Pajar Esuk	-	-	1	1	1	5
4.	Sidoharjo	1	-	-	2	1	6
5.	Podomoro	-	-	1	-	3	3
6.	Bumi Arum	-	-	1	-	1	3
7.	Pajar Agung	-	-	-	-	-	6
8.	Pringsewu Utara	-	-	-	2	5	5
9.	Pringsewu Selatan	2	-	-	1	5	7
10.	Pringsewu Barat	-	-	-	2	2	7
11.	Pringsewu Timur	1	-	-	8	1	5
12.	Rejosari	-	1	-	-	1	3
13.	Bumi Ayu	-	1	-	-	1	4
14.	Podosari	-	-	-	-	2	3
15.	Fajar Agung Barat	1	-	-	-	2	3
Jumlah		5	2	4	16	30	68

Sumber : Data Kecamatan Pringsewu, 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa Kecamatan Pringsewu memiliki sarana kesehatan lengkap mulai dari rumah sakit sebanyak 5, puskesmas sebanyak 2, puskesmas pembantu sebanyak 4, praktek dokter sebanyak 16, praktek bidan atau perawat sebanyak 30, dan yang terbanyak ada posyandu yaitu sebanyak 68.

- c. Fasilitas kesehatan yang tersedia, sebagai berikut:

Tabel 13. Banyaknya Sarana Pendidikan di Kecamatan Pringsewu Tahun Ajaran 2020/2021

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah Dasar dan Sederajat		Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama		Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir		
		SD	MI	SLTP	MTS	SLTA	SMK	MA
1.	Margakaya	3	1	1	-	-	-	-
2.	Waluyojati	2	1	-	-	-	-	-
3.	Pajar Esuk	4	-	-	1	-	1	-
4.	Sidoharjo	3	-	1	-	-	-	-
5.	Podomoro	3	-	-	1	-	-	-
6.	Bumi Arum	2	-	-	-	-	-	-
7.	Pajar Agung	2	-	1	-	-	1	-
8.	Pringsewu Utara	3	-	2	-	1	1	-
9.	Pringsewu Selatan	4	1	4	2	-	1	1
10.	Pringsewu Barat	5	-	-	-	1	2	-
11.	Pringsewu Timur	4	-	2	-	1	4	-
12.	Rejosari	4	-	1	1	-	1	-
13.	Bumi Ayu	1	-	-	-	-	-	-
14.	Podosari	-	-	-	-	1	-	-
15.	Fajar Agung Barat	-	1	1	-	-	-	-
Jumlah		40	4	13	5	4	11	1

Sumber : Data Kecamatan Pringsewu, 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Pringsewu memiliki sarana yang dapat dikatakan sudah lengkap. Dari tabel tersebut, Kecamatan Pringsewu memiliki fasilitas pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) yaitu SD sebanyak 40 unit dan MI sebanyak 4 unit, pada jenjang sebanyak Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu SMP sebanyak 13 unit dan MTS 5 unit, pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu SMA 4 unit, SMK sebanyak 11 unit dan MA sebanyak 1 unit sekolah.

4.2.6 Etnis atau Suku

Secara sosial pengertian etnik sepadan dengan klan, kelompok, atau ras. Secara etimologis, kata etnik (*ethnic*) berasal dari bahasa Yunani, *ethnos* yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Latin, *ethnicus* yang berarti bangsa atau kelompok manusia. Pada tahap perkembangannya, *ethnos* kemudian diartikan sebagai sebuah kelompok sosial yang didasarkan pada ras, keturunan (*ancestry*), tradisi, bahasa dan sejarah (Halim, 2020). Dapat disimpulkan bahwa etnis merupakan suatu kesatuan manusia yang disatukan atas dasar persamaan-persamaan, seperti kesamaan sejarah, nenek moyang, tradisi, bahasa, ras, keturunan, dan lain-lain. Etnis disebut dengan suku yang merupakan identifikasi sosial atau kategori sosial dimana konsep tersebut didasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat berdasarkan kepercayaan, adat istiadat, garis keturunan, sejarah, bahasa, yang dianggap oleh masyarakat.

Kecamatan Pringsewu sendiri terdiri dari beragam etnis/suku bangsa yang terdiri dari Etnis Jawa, Sunda, Batak, Padang, Banten, Semendo, China, Palembang, dan mayoritas penduduk asli adalah Jawa. Meskipun demikian, keberagaman etnis/suku di Kecamatan Pringsewu tetap membuat masyarakatnya selalu hidup rukun dan damai.

4.2.7 Banyak Rumah Makan dan Industri Makanan dan Minuman

Disini akan menyajikan data tentang banyaknya rumah makan atau restoran menurut keberadaan di setiap Desa, banyaknya obyek wisata, dan jumlah 44 industri makanan minuman di Kecamatan Pringsewu. Sebagai berikut :

Tabel 14. Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pringsewu

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah Makan/Restoran
1.	Margakaya	-
2.	Waluyojati	-
3.	Pajar Esuk	4
4.	Sidoharjo	14
5.	Podomoro	-
6.	Bumi Arum	-

7.	Pajar Agung	-
8.	Pringsewu Utara	10
9.	Pringsewu Selatan	8
10.	Pringsewu Barat	8
11.	Pringsewu Timur	15
12.	Rejosari	2
13.	Bumi Ayu	-
14.	Podosari	7
15.	Fajar Agung Barat	-
Jumlah		68

Sumber : Data Kecamatan Pringssewu, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rumah makan atau restoran di Kecamatan Pringsewu berjumlah 68 dengan jumlah rumah makan atau restoran terbanyak terdapat di Kelurahan Pringsewu Timur sebanyak 15, Kelurahan Sidoharjo sebanyak 14 dan Kelurahan Pringsewu Utara sebanyak 10 rumah makan atau restoran.

Tabel 15. Banyaknya Industri Pengolahan Bahan Makanan dan Minuman Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pringsewu Tahun 2020

No.	Desa/Kelurahan	Industri makanan dan minuman (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak, susu dan makanan dari susu, makanan dan minuman lain, dan lain-lain)
1.	Margakaya	6
2.	Waluyojati	10
3.	Pajar Esuk	3
4.	Sidoharjo	8
5.	Podomoro	1
6.	Bumi Arum	-
7.	Pajar Agung	-
8.	Pringsewu Utara	-
9.	Pringsewu Selatan	-
10.	Pringsewu Barat	-
11.	Pringsewu Timur	4
12.	Rejosari	-
13.	Bumi Ayu	-
14.	Podosari	-
15.	Fajar Agung Barat	5
Jumlah		37

Sumber : Data Kecamatan Pringsewu, 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Industri makanan dan minuman (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan

lemak, susu dan makanan dari susu, makanan dan minuman lain, dan lain-lain) yang ada di Kecamatan Pringsewu tahun 2020 yaitu sebanyak 37 industri. Industri pengolahan makanan dan minuman terbanyak terdapat di Desa Waluyojati yaitu sebanyak 10 industri, Kelurahan Sidoharjo sebanyak 8 industri dan Desa Margakaya sebanyak 6 industri pengolahan bahan makanan dan minuman.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada akhir penulisan skripsi ini, peneliti ingin memberikan penutup berupa kesimpulan, dengan kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengembangan terhadap UMKM yang ada di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten pringsewu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu memiliki peranan sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan instansi OPD struktural terkait
 - b. Melakukan perencanaan program pengembangan UMKM bersama OPD terkait
 - c. Memonitoring dan evaluasi program pengembangan UMKM yang dijalankan OPD

2. Dampak yang ditimbulkan dari peran BAPPEDA dalam pengembangan UMKM bagi pelaku usaha perdagangan di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu sebagai berikut :

Sebagian besar pelaku usaha merasa bahwa pembinaan terhadap pengembangan UMKM telah mendapat manfaat banyak bagi usaha mereka seperti, bantuan permodalan usaha, bantuan mesin dan alat-alat produksi, bantuan perlengkapan usaha, kemudahan dalam perizinan usaha, pemberian sertifikat teruji kelayakan higienis makanan, pelatihan-pelatihan UMKM baik itu secara online maupun offline,seminar-seminar entrepreneurship, marketing, branding dan lain-lainnya.Tentunya hal tersebut dapatsangat bermanfaat bagi perkembangan usaha.

Tetapi sebagian pelaku usaha lain merasa bahwa mereka belum merasakan dampak dari adanya pembinaan terhadap pengembangan UMKM yang telah

dilakukan, menurut mereka pembinaan yang dilakukan belum merata seperti bantuan permodalan, pelatihan-pelatihan pengembangan usaha belum pernah mereka rasakan. Mereka melihat bahwa pembinaan terkait pengembangan UMKM belum merata dan hanya pelaku usaha itu-itu saja yang diberikan. Padahal menurut mereka usaha mereka juga ikut terdampak dari adanya pandemi covid-19. Mereka berharap untuk kedepannya agar bantuan-bantuan terkait pengembangan UMKM bisa dilakukan secara merata, tepat sasaran, dan mereka juga bisa merasakan manfaatnya.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk BAPPEDA melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Harapannya untuk bisa menyediakan wadah untuk UMKM berkumpul untuk sharing pengalaman dalam berusaha para pelaku usaha dan pengalaman-pengalaman lain dalam mengembangkan usaha jadi para pelaku usaha dapat bertukar referensi maupun relasi juga dalam berusaha agar mengembangkan usaha mereka masing-masing.
2. Sebaiknya pembinaan terkait pengembangan UMKM yang dilakukan harus lebih merata seperti bantuan permodalan, pelatihan-pelatihan pengembangan usaha, dan lain-lainnya. Harapannya agar pembinaan terkait pengembangan UMKM yang diberikan harus tepat sasaran dan didata ulang siapa saja pelaku usaha yang wajib menerimanya tidak hanya itu-itu saja yang mendapatkan pembinaan terkait pengembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abu Achmadi, dan Cholid Narbuko. (1997). *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Anoraga, P. (2002). *Koperasi, kewirausahaan, dan usaha kecil*. Penyalur tunggal, Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Balai Pustaka.
- Hasibuan, Malayu. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi aksara
- Iskandar Wiryokusumo dalam Afrilianasari (2014). *Teori Pengembangan*, Surabaya Paul, A. W. & dkk. (2018) *Mikro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Jhingan. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Persada.
- Kirk, J. & Miller, M. L., (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills, CA, Sage Publications.
- Moleong, lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nasikun, (2012). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persa
- Rustiadi, E. (2018). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Yayasan 1 Obor Indonesia.
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia

Soekanto, S. (2001). *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara. Jakarta.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta.

Tulus T.H. Tambunan. (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

2. Karya Ilmiah

Anam, K. (2019). STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN JEPARA. *Journal of Politic and Government Studies*.

Bohori, M. (2019). Peran Dinas Koperasi dalam pengembangan UMKM Unggulan di Surabaya (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Diva, G. (2009). Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta. *Jakarta: Bakrie School of Management*.

Kusnindar, A. A. (2018). PROFILING UKM DI KABUPATEN PRINGSEWU SEBAGAI BASIS MENCIPTAKAN MODEL PEMBERDAYAAN UKM YANG TEPAT SASARAN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen: Jurnal Ilmiah Multi Science*.

Kurniawati, F. (2010). Strategi Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Surakarta Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro (Ukm)(Studi Tentang Usaha Kreatif Di Night Market Ngarsopuro).

Resalawati, A. (2012). Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM di Indonesia.

Sofyan, S. (2017). PERAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA.

Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) Indonesia. *Cano Ekonomos*.

Sumarno, A. (2012). Perbedaan Penelitian dan Pengembangan Pengembangan.

Tambunan, Tulus. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*.

Utama, D. D. T., & DARWANTO, D. (2013). *Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) berbasis ekonomi kreatif di kota semarang* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Wuryandani, D., & Meilani, H. (2013). Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*.

3. Dokumen Pemerintah

Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. *Jakarta (ID): RI*.

Indonesia, R. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Republik Indonesia.

4. Sumber Lain

<https://www.scribd.com/doc/314834468/Pengertian-UMKM>

<https://kbbi.web.id/peran>

<https://kbbi.web.id/pengembangan>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pringsewu,_Pringsewu

<https://www.pringsewukab.go.id/pages/sejarah-kabupaten-pringsewu>

<https://grhasia.jogjaprov.go.id/berita/78/monitoring-dan-evaluasi-programkegiatan-skpd>